

RELASI KOMPETENSI BIROKRAT DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BIROKRASI TERHADAP POLA KEBIJAKAN PARIWISATA DI KOTA PALEMBANG

Alamsyah

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

Email: alamsyah78@fisip.unsri.ac.id

Abstract

This article aims to explain the relation of bureaucrats competency and institutional capacity of bureaucracy to the pattern of tourism policy in Palembang. Based on empirical research using qualitative approaches-positivist, researcher concluded that (a) the capacity of bureaucrats and bureaucracy, especially Department of Tourism and Culture in Palembang City, in managing tourism affairs is still weak; (b) there is a causal relationship between bureaucrats competency with institutional capacity competency, as well as the contribution of bureaucrats competency and institutional capacity competency on the pattern of policies and programs of Department of Tourism and Culture in Palembang City simultaneously. Based on these findings, the authors suggested that Palembang municipality government should managing bureaucrats and institutional competency as a starting point of tourism development reform of in their city.

Keywords: *Bureaucracy, Competency, Tourism policy, Palembang*

PENDAHULUAN

Secara normatif, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang pengelolaannya sudah didesentralisasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Respon pemerintah daerah di Sumatera Selatan terhadap sektor pariwisata sangat variatif. Di beberapa kabupaten/kota yang memiliki potensi pariwisata alam seperti Kota Pagar Alam yang memiliki Gunung Dempo dan Kabupaten OKU Selatan yang memiliki Danau Ranau, pemerintah setempat menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan. Di beberapa kabupaten/kota yang tidak memiliki potensi pariwisata, pembangunan sektor pariwisata cenderung stagnan.

Kota Palembang masih merupakan magnet sektor di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan karena status Palembang sebagai kota tua yang memiliki beragam tempat-tempat bersejarah yang menarik minat kunjungan wisatawan domestik dan asing. Di samping itu, statusnya sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan secara otomatis menjadikan Kota Palembang sebagai pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan pusat sosial-budaya. Konsekuensinya, beragam infrastruktur pendukung sektor pariwisata tersedia memadai di kota ini, mulai dari pilihan hotel, tempat hiburan, tempat rekreasi keluarga, pusat-pusat perbelanjaan modern, fasilitas olahraga, dan lain sebagainya. Tak mengherankan jika kemudian kunjungan wisatawan asing dan domestik ke Kota Palembang melampaui kabupaten/kota lain yang ada di Sumatera Selatan.

Meskipun Kota Palembang memiliki potensi (misalnya di lihat dari ketersediaan infrastruktur beragam moda transportasi, pilihan destinasi wisata, hotel, rumah makan, tempat hiburan, dan tempat rekreasi) sebagai magnet perkembangan pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan, tetapi fakta kunjungan wisatawan sangat fluktuatif, didominasi wisatawan domestik, dan turis asing akan datang jika ada *event* internasional. Fakta empiris mengarahkan kita kepada kesimpulan sementara bahwa pariwisata di Kota Palembang lebih berbasis peristiwa (*event*), dan bukan berbasis tempat (*place*).

Peristiwa itu bisa berbentuk kegiatan korporasi, festival budaya, turnamen olahraga, dan lain sebagainya. Sedangkan pariwisata berbasis tempat bisa dimaknai sebagai *cultural tourism* yang lebih mengedepankan keunikan budaya dan geografis komunitas.

Fakta juga menunjukkan bahwa event-event yang diselenggarakan selama ini tidak terlalu berhasil menahan turis asing dan turis domestik untuk lebih lama menginap di Kota Palembang. Dalam periode 2006-2009, turis asing dan domestik rata-rata hanya menginap 2 (dua) hari, baik di hotel berbintang maupun di hotel berbintang. Di samping itu, proporsi tingkat hunian (tingkat okupansi kamar hotel) di Kota Palembang dalam periode 2006-2009 belum berada di atas 50 persen. Untuk hotel berbintang, tingkat hunian hanya sebesar 42 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan hotel non-bintang yang hanya mencapai tingkat okupansi sebesar 32 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang serius yang harus dibenahi di sektor pariwisata Kota Palembang agar para turis asing dan domestik betah menginap di Palembang. Semakin lama mereka menginap, semakin besar uang yang akan mereka belanjakan dan semakin besar proporsi pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

Mari diasumsikan bahwa pilihan pengembangan pariwisata berbasis peristiwa (*event*) merupakan pilihan kebijakan yang tempuh secara sadar oleh para pembuat kebijakan di sektor pariwisata. Bertolak dari asumsi ini, pertanyaannya kemudian adalah *reason d'etre* seperti apa yang melandasi para pembuat kebijakan memilih pilihan kebijakan seperti ini? Padahal, sangat jelas bahwa strategi ini membuat kunjungan turis asing dan domestik sangat bergantung dengan beragam *event* yang menjadi pemicu datangnya turis asing dan domestik. Jika tidak ada *event*, maka tidak ada kunjungan turis asing dan domestik.

Pilihan strategi pengembangan pariwisata berbasis *event* menyebabkan kompetensi para pembuat kebijakan di sektor pariwisata memainkan peran sentral. Sebab, merekalah yang kemudian menentukan *event* mana yang akan dilaksanakan dan/atau tidak dilaksanakan. Pada titik ini, pertanyaannya adalah seberapa jauh birokrat di satuan kerja perangkat daerah yang mengelola kewenangan pengembangan sektor pariwisata daerah memiliki kompetensi untuk merumuskan dan memproduksi beragam peristiwa (*event*) yang mampu memicu peningkatan turis asing dan domestik.

Sukses tidaknya beragam *event* sebagai pemicu peningkatan turis asing dan domestik tidak tergantung dengan kompetensi personal birokrat, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan birokrasi publik. Sebab, seluruh ide yang diproduksi birokrat secara personal mau tidak mau akan diproses secara kelembagaan oleh birokrasi publik yang menangani otoritas pengembangan sektor pariwisata. Pada titik ini, kelembagaan birokrasi publik menjadi penting untuk diperhatikan.

Uraian di atas menunjukkan bagaimana kompetensi birokrat, kelembagaan birokrasi, dan sektor pariwisata berbasis *event* memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Bertolak dari fakta ini, riset ini ingin menunjukkan bagaimana sesungguhnya hubungan ketiga variabel ini secara empiris. Pemahaman terhadap hubungan ketiga variabel ini diharapkan dapat menstimulasi ide-ide kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-positivis. Satuan analisisnya adalah organisasi. Ada tiga variabel dalam penelitian ini, yakni: kompetensi birokrat, kapasitas kelembagaan birokrasi, dan pola kebijakan/program pariwisata.

Variabel kompetensi birokrat didefinisikan sebagai kemampuan para pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengelola kewenangan bidang pariwisata. Variabel ini diukur dengan indikator: (a) tingkat pengetahuan kepariwisataan yang dimiliki para pegawai negeri sipil; (b) tingkat kesesuaian antara latar belakang pendidikan terakhir dengan bidang tugas kepariwisataan; (c) cara pandang para pegawai negeri sipil terhadap sektor pariwisata; (d) metode belajar para pegawai negeri sipil untuk memahami

dinamika perkembangan sektor pariwisata; dan (e) cara pandang para pegawai negeri sipil terhadap peran kelompok masyarakat dan para pelaku usaha di sektor pariwisata.

Variabel kapasitas kelembagaan birokrasi didefinisikan sebagai kemampuan satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pariwisata untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian program di bidang pariwisata. Variabel ini diukur melalui indikator sebagai berikut: (a) jumlah pegawai negeri sipil di satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pariwisata berdasarkan umur, tingkat pendidikan, pangkat/golongan, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, riwayat pekerjaan selama menjadi PNS; (b) tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pariwisata; (c) jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mengembangkan sektor pariwisata; (d) jenis teknologi yang digunakan untuk mengembangkan sektor pariwisata; (e) pola *standard operating procedure* yang digunakan untuk mengorganisir program-program dan kegiatan kepariwisataan; (f) pola dan mekanisme perencanaan yang digunakan; (g) jenis input yang diterima birokrasi dari lingkungannya; (h) pola pembagian kerja yang diterapkan; (i) pola penggunaan aturan-aturan organisasi.

Sedangkan variabel pola kebijakan dan program pariwisata diartikan sebagai tindakan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pariwisata dalam siklus satu tahun anggaran untuk mendorong perkembangan sektor pariwisata. Variabel ini diukur dari indikator sebagai berikut: (a) jenis tujuan-tujuan yang ditetapkan dan ingin dicapai; (b) jumlah kegiatan yang direncanakan dan direalisasikan dalam satu tahun anggaran; (c) bentuk dan jenis kontribusi langsung dan tidak langsung kegiatan yang dilaksanakan terhadap pengembangan sektor pariwisata; (d) pola partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasi kebijakan dan program pariwisata; (e) jumlah potensi dan destinasi wisata yang berhasil dikelola; (f) pola pengelolaan potensi dan destinasi wisata.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palembang. Pilihan atas kota ini didasari pertimbangan bahwa (a) ia sudah menjadi destinasi wisatawan domestik di Sumatera Selatan; (b) Pemerintah Kota Palembang menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan pembangunan daerah.

Data diperoleh dengan melakukan wawancara terstruktur kepada para pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan struktural di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani bidang pariwisata (*guide interview* terlampir). Hasil wawancara ini merupakan data primer penelitian. Sedangkan data sekunder penelitian dikumpulkan dengan memanfaatkan publikasi-publikasi resmi dari lembaga-lembaga yang dapat dipercaya (pedoman pengumpulan data sekunder terlampir). Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman pada indikator yang telah dibuat sebelumnya.

Key informan yang menjadi responden penelitian ini adalah: kepala dinas pariwisata, sekretaris dinas pariwisata, kepala bidang di dinas pariwisata, dan kepala seksi di dinas pariwisata. Sedangkan *key informan* dari masyarakat akan diambil dari para pelaku industri pariwisata, baik di sektor hilir dan sektor hulu. *Key informan* dari masyarakat akan dipilih dengan metode bola salju (*snow ball*). *Key informan* yang menjadi bola salju pertama akan dikonsultasikan dengan dengan Dinas Pariwisata Kota Palembang. Jumlah *key informan* dari masyarakat ini empat orang. Dua orang berasal dari industri hulu (*misalnya*, pengusaha hotel dan rumah makan), dan dua orang berasal dari industri hilir (*misalnya*, pemilik gerai baju khas Palembang dan industri makanan khas Palembang).

HASIL DAN PEMBAHASA

Hakikat pariwisata

Sampai saat ini tak ada kesepakatan baku dikalangan ilmuwan tentang definisi pariwisata (*tourism*). Karena kepentingan penyusunan statistik pariwisata belaka, World Tourism Organization (WTO) mengadopsi batasan pariwisata sebagai *the activities of persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business, and*

other purposes (WTO, 1991). Berdasarkan definisi ini, inti pariwisata terletak pada aktivitas perjalanan untuk menginap di wilayah lain yang bukan menjadi tempat tinggal seseorang.

Sementara itu, Goeldner & Ritchie (2006: 5) mendefinisikan pariwisata (*tourism*) sebagai *the processes, activities, and outcomes arising from the relationships and the interactions among tourist, tourism suppliers, host governments, host communities, and surrounding environments that are involved in the attracting and hosting of visitors*. Definisi ini mempertegas aktor-aktor utama yang terlibat dalam sektor pariwisata, yakni: *tourist, tourism suppliers, host governments, dan host communities*. Selain itu, proses interaksi antar aktor merupakan bagian tak terpisahkan dari sektor pariwisata.

Masing-masing aktor memiliki kepentingan yang berbeda dengan pariwisata. Para turis mereka berharap bisa memperoleh pengalaman fisik dan psikis yang menyenangkan dan memuaskan dari kunjungan yang mereka lakukan. Para pelaku bisnis berharap bisa mendapatkan keuntungan dari aktivitas penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan para turis selama melakukan perjalanan. Pemerintah berharap bisa memperoleh pendapatan, baik langsung maupun tidak langsung, dari aktivitas para turis. Bagi masyarakat, kedatangan para turis memberikan pengalaman budaya positif dan/atau negatif kepada mereka (Goeldner & Ritchie, 2006: 5).

Seseorang melakukan perjalanan karena beragam motif. Arab Saudi, India, dan Vatikan adalah wilayah yang sering dikunjungi penduduk dunia karena motif keagamaan. Bali, Singapura, dan kota-kota besar di Eropa dan Amerika Serikat adalah sebagian wilayah yang sering dikunjungi banyak orang karena beragam motif, mulai dari ingin mencari kesenangan, bermain judi, menonton pertunjukkan olahraga, belanja, sekolah dan kuliah, berobat, dan lain sebagainya.

Aktivitas perjalanan (*travelling*) ke seluruh penjuru dunia semakin cepat karena perkembangan faktor teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi. Semakin banyak orang melakukan perjalanan, semakin sering orang melakukan perjalanan, semakin banyak informasi mengenai daerah-daerah baru yang bisa dikunjungi, maka semakin tinggi pertumbuhan sektor pariwisata. Stabilitas sosial-politik di ranah global yang meminimalisir perang antar negara memiliki kontribusi signifikan atas lalu lintas manusia ke seluruh penjuru dunia. Pertumbuhan industri pariwisata juga didorong oleh ekspansi para pemilik pemodal ke sektor usaha yang terkait dengan fungsi pelayanan para wisata, mulai dari hotel, maskapai penerbangan, agen perjalanan, lembaga pendidikan tinggi, media massa, internet, dan sebagainya.

Peran pemerintah di sektor pariwisata

Menurut Elliot (1997: 21-35), ada 2 (dua) alasan yang mendorong peran pemerintah di sektor pariwisata, yakni alasan historis dan alasan ekonomis. Alasan historis merujuk kepada peran-peran yang dilakukan pemerintah di zaman Romawi dan Yunani kuno dalam rangka membangun infrastruktur dan memberikan rasa aman kepada seluruh penduduknya untuk melakukan perjalanan dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Sedangkan alasan ekonomis merujuk kepada keinginan pemerintah untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor pendapatan negara dan sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran pemerintah di sektor pariwisata dimanifestasikan melalui kebijakan pariwisata. Per definisi, mengutip Goeldner & Ritchie, (2006: 405), kebijakan pariwisata dapat didefinisikan sebagai *a set of regulations, rules, guidelines, directives, and development/promotion objectives and strategies that provide a framework within which the collective and individual decisions directly affecting long-term tourism development and the daily activities within a destination are taken*.

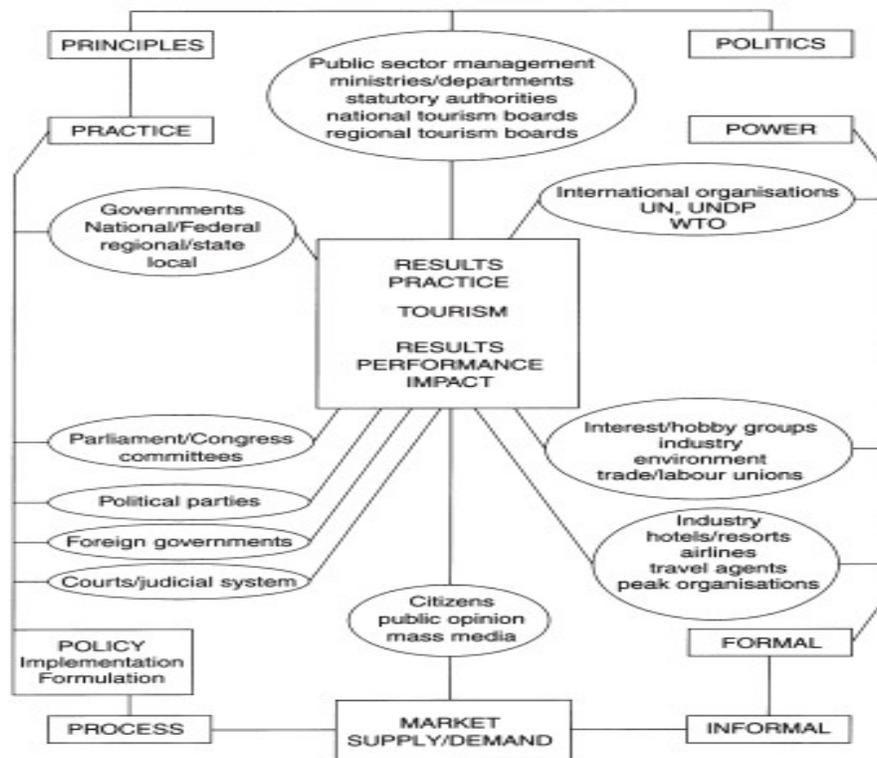
Sedangkan menurut Edgell, Sr., et.al., (2008: 7), kebijakan pariwisata merupakan *a progressive course of actions, guidelines, directives, principles, and procedures set in an ethical framework that is issues-focused and best represents the intent of a community (or nation) to effectively meet its planning, development, product, service, marketing, and sustainability goals and objectives for the*

future growth of tourism. Defenisi ini menekankan pentingnya aspek *marketing* dan *sustainability* proses dan output kebijakan pariwisata yang diproduksi.

Lebih jauh Goeldner & Ritchie (2006: 405) mengungkapkan bahwa fungsi utama kebijakan pariwisata adalah: (a) *it defines the rule of the game – the terms under which tourism operators must function*; (b) *it sets out activites and behaviors that are acceptable for visitors*; (c) *it provides a common direction and guidance for all tourism stakedolers whithin a destination*; (d) *it facilitate consensus around specific strategies and objective for a given destination*; (e) *it provides a framework for public/private discussions on the role and contributions of the tourism sector to the economy and to society in general*; (f) *it allows tourism to interface more effectively with other sectors of the economy*.

Kebijakan pariwisata tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan sektor-sektor lainnya. Selain itu, ia juga dipengaruhi oleh karakteristik institusi pemerintah yang menjadi tempat pengambilan keputusan kebijakan pariwisata. Elliott (1997) mengusulkan framework sebagaimana divisualisasikan Gambar 1 untuk memahami kebijakan pariwisata.

Gambar 1 Framework kebijakan pariwisata



Sumber: Elliott (1997: 39)

Dalam framework ini, upaya pemerintah membangun pariwisata tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga berkaitan dengan upaya pelayanan dan pemenuhan kepentingan publik yang lebih luas kepada masyarakat. Pemerintah juga harus mengelola relasi kekuasaan formal dan informal yang muncul dalam lingkungan politik dan industri. Karena arena kebijakan pariwisata berada di wilayah yang merupakan irisan antara lingkungan politik dan lingkungan industri, maka kebijakan pariwisata harus memenuhi (5) lima prinsip, yakni: kepentingan publik, pelayanan publik, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas (Elliott, 1997: 38).

Riset ini akan menggunakan framework di atas untuk membangun model peran pemerintah di sektor pariwisata. Tetapi, tidak semua komponen yang tercantum dalam framework Elliott akan

dianalisis. Riset ini akan membatasi diri pada persoalan relasi kompetensi birokrasi dan kapasitas kelembagaan birokrasi terhadap formulasi dan implementasi kebijakan pariwisata.

Kompetensi birokrat

Birokrat adalah istilah yang merujuk kepada seseorang yang bekerja di organisasi publik. Cirinya, birokrat diangkat melalui sistem rekrutmen tertentu atas dasar prinsip meritokrasi. Di Indonesia, birokrat adalah seluruh pegawai pemerintah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Sedangkan istilah kompetensi bisa diartikan sebagai karakteristik yang dimiliki dan digunakan individu secara nyata dan konsisten untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Termasuk dalam karakteristik ini adalah pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), motif sosial, cara berpikir, perasaan, dan tindakan (Dubois, *et.al.*, 2004: 16).

Kompetensi bisa ditunjukkan dengan banyak cara. Salah satu cara untuk melihat ada atau tidaknya kompetensi adalah melalui perilaku atau adanya keluaran nyata yang dihasilkan oleh aktivitas pekerjaan tertentu. Kompetensi bisa diukur dengan indikator perilaku. Indikator perilaku adalah pernyataan tentang sebuah tindakan atau sekumpulan tindakan yang diharapkan sukses tatkala seseorang menggunakan kompetensi yang dimilikinya (Dubois, *et.al.*, 2004: 19-20).

Dalam khasanah literatur administrasi negara, makna kompetensi birokrat bisa diturunkan dari teori-teori yang dikembangkan dari beragam perspektif yang berkembang dalam studi ilmu administrasi. Dalam konteks ini, penulis akan menguraikan makna kompetensi birokrat yang diturunkan dari pemikiran teoritis yang dikembangkan paradigma dikotomi politik-administrasi, paradigma *new public management*, dan paradigma *new public service*.

Paradigma dikotomi politik-administrasi menganggap bahwa ada perbedaan yang tegas antara politik dan administrasi. Politik berkaitan dengan bagaimana memformulasikan kebijakan, sedangkan administrasi berkaitan dengan urusan implementasi kebijakan. Keduanya tak bisa disatukan, meskipun saling menopang satu dengan yang lainnya. Dengan ide seperti ini, paradigma ini menghendaki agar administrator memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik yang diputuskan di arena politik secara efektif dan efisien.

Sementara itu, paradigma *new public management* menganggap bahwa pemerintah seharusnya memberikan porsi besar terhadap peran sektor swasta dalam mengelola pelayanan publik karena faktor inefisiensi yang melekat di birokrasi pemerintah (Lane, 2000). Pemerintah tidak perlu terlibat langsung dalam pengadaan barang dan jasa publik, tetapi cukup menyediakan lingkungan yang memungkinkan meningkatnya peran sektor swasta dalam pengadaan barang dan jasa publik. Dalam konteks pemikiran seperti ini, nampak sekali paradigma *new public management* lebih memahami kompetensi birokrat sebagai kapasitas pemerintah untuk merumuskan regulasi, menjalankan fungsi-fungsi klasik pemerintahan, dan membangun komunikasi dan kemitraan dengan aktor-aktor swasta.

Sedangkan, paradigma *new public service* menganggap bahwa pemerintah bukan semata-mata memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa publik, tetapi memproduksi dan mendistribusikan demokrasi. Pemerintah harus memfasilitasi beragam kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik dan penciptaan nilai-nilai publik (Denhardt & Denhardt, 2007). Bertolak dari pemahaman seperti ini, paradigma *new public service* memahami kompetensi birokrat sebagai seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis-manajerial yang dimiliki birokrat untuk melayani individu dan kelompok sebagai warga negara, dan bukan sebatas warga negara sebagai pelanggan (*customer*) setia barang dan jasa publik tertentu.

Kapasitas kelembagaan birokrasi

Birokrasi adalah organisasi publik. Organisasi publik berbeda seratus derajat dengan organisasi swasta. Keberadaan organisasi publik ada karena alasan-alasan ekonomi dan politik. Alasan ekonomi

biasanya dikaitkan dengan fakta kegagalan pasar (*market mechanism*) dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. Sedangkan alasan politik dikaitkan dengan fungsi organisasi publik yang bertanggung jawab memelihara sistem politik, sistem hukum, dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat (Rainey, 2009: 66-68)

Ada beberapa ciri yang membedakan organisasi publik dengan organisasi swasta, yakni: otoritas yang terfragmentasi, proses pembuatan kebijakan harus terbuka dan responsif, tujuan-tujuan kebijakan kebanyakan ambigu dan tidak nyata (*intangible*), serta adanya kendala prosedural dan kendala politik (Tompkins, 11-18). Sedangkan Christensen, *et.al.*, (2007: 6-8) mengungkapkan ciri-ciri organisasi publik sebagai berikut: organisasi publik dipimpin oleh orang yang dipilih melalui pemilihan umum, mereka memiliki karakter multi-fungsi, mereka tidak bekerja di arena yang kompetitif dan bebas.

Karena karakternya berbeda dari karakter organisasi swasta, maka kapasitas kelembagaan birokrasi juga tidak bisa dijelaskan dengan teori-teori yang dikembangkan dari organisasi swasta. Dalam konteks ini, birokrasi memiliki sumberdaya yang berbeda dengan sumberdaya yang dimiliki organisasi swasta. Kepemilikan atas sumberdaya ini bisa dijadikan titik tolak untuk menjelaskan kapasitas kelembagaan birokrasi publik. Menurut Peters (2001: 234-), birokrasi memiliki sumberdaya berupa informasi, keahlian spesifik, otoritas untuk membuat kebijakan (*the power of decision*), memiliki pendukung politik, citra apolitis, memiliki seperangkat ideologi, permanen dan stabil.

Dengan sumberdaya ini, birokrasi publik mengelola dan mentransformasikan input yang berasal dari lingkungan dimana mereka berada ke dalam serangkaian tugas dengan menggunakan teknologi untuk mencapai kinerja yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini terjadi dalam konteks struktur organisasi yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip tertentu (pembagian kerja, penggunaan aturan tertulis, dan distribusi otoritas dan tanggung jawab). Singkat kata, kapasitas kelembagaan birokrasi terkait dengan kemampuan birokrasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui optimalisasi sumberdaya dengan latar desain struktur dan proses organisasi tertentu.

TEMUAN DAN DISKUSI

Kewenangan, kebijakan, dan program Pemerintah Kota Palembang di sektor pariwisata

Secara normatif, ada dua sumber utama yang menjelaskan kewenangan Pemerintah Kota Palembang di sektor pariwisata, yakni: (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; dan (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: (a) pemerintahan daerah memiliki kewenangan selain kewenangan di sektor politik luar negeri, keamanan, pertahanan, agama, yustisi, moneter, dan fiskal (pasal 10); (b) urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota meliputi: perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan kewenangan pemerintahan kabupaten/kota dalam pembangunan sektor pariwisata sebagai berikut: (a) menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; (b) menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; (c) menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; (d) melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; (e) mengatur penyelenggaraan

dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; (f) memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; (g) memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; (h) menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; (i) memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang ada di daerahnya; (j) menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; (k) mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pemerintahan kabupaten/kota: (a) berkewajiban menyusun rencana induk pengembangan kepariwisataan yang ditetapkan dengan peraturan daerah yang berisi tentang perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi wisata, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata (pasal 8 dan pasal 9); (b) dapat menetapkan kawasan strategis pariwisata yang ditetapkan dengan keputusan pemerintah kabupaten/kota (pasal 11); (c) wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata; (d) menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan wisatawan; menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum; memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif masyarakat luas (pasal 23); (e) pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).

Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas menjadi dasar Pemerintah Kota Palembang untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan di sektor pariwisata. Langkah pertama yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang c/q Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengawal pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pariwisata adalah merumuskan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Visi dan misi di atas menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Palembang dalam menyusun kebijakan dan program pemerintah di sektor pariwisata. Dari pernyataan visi dan misinya, dapat diketahui kata kunci pembangunan sektor pariwisata di Kota Palembang, yakni: pertumbuhan ekonomi, pelestarian kebudayaan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata, peningkatan sumberdaya manusia yang profesional, dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Saat ini, Kota Palembang memiliki beberapa destinasi wisata. Tempat-tempat wisata ini dikelola sepenuhnya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Palembang bekerjasama dengan dinas lainnya yang terkait (*misalnya*, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan Kota, dan lain sebagainya). Kerjasama ini mutlak dilakukan. Sebab, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya berwenang mengelola urusan kepariwisataan saja. Aspek lainnya menjadi tanggung jawab dinas-dinas lainnya sesuai dengan tupoksi dinas-dinas tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek-objek wisata ini harus dilihat kasus per kasus. Sebagai contoh, dalam pengelolaan objek wisata berupa Masjid Agung, Masjid Ki Merogan, Masjid Suro, partisipasi masyarakat sangat aktif dan menjadi kata kunci keberhasilan perawatan objek wisata yang berfungsi sebagai tempat ibadah bagi umat Islam. Sedangkan dalam kasus Sungai Musi dan Kawasan Benteng Kuto Besak, partisipasi masyarakat dalam menjaga Sungai Musi dan Kawasan Benteng Kuto Besak sangat minim. Hal ini terlihat dari kebiasaan warga untuk membuat sampah ke Sungai Musi dan beberapa tempat di Kawasan Benteng Kuto Besak.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga objek-objek wisata juga bisa bermakna sebagai kesediaan untuk membayar retribusi yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Palembang di setiap objek wisata. Partisipasi masyarakat juga bisa diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan event-event yang tercantum dalam kalender tahunan pariwisata di Kota Palembang. Rangkaian kegiatan ini tidak sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Palembang. Sebagian kegiatan tersebut diinisiasi dan dikelola sepenuhnya kelompok masyarakat (*misalnya*, Kerukunan Keluarga Palembang dan umat Konghucu di Kota Palembang). Peran Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Palembang hanya membantu mempromosikan kegiatan tersebut.

Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata secara profesional masih memerlukan waktu untuk direalisasikan. Pulau Kemaro, misalnya, sedang ditawarkan Pemerintah Kota Palembang kepada investor untuk dikelola secara profesional dan *profit-oriented* sebagai tujuan wisata bertaraf internasional (<http://travel.kompas.com/read/2013/08/10/1136361/Wali.Kota.Palembang.Ajak.Investor.Kelola.Pulau.Kemaro>). Tetapi, perkembangan ini menunjukkan *political will* dan visi Pemerintah Kota Palembang yang melihat sektor pariwisata sebagai salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi dan penggerak perekonomian masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam sektor pariwisata juga bisa diartikan dengan keterlibatan individu dan anggota kelompok masyarakat dalam mengembangkan industri hulu (misalnya, sektor transportasi dan industri biro perjalanan) dan industri hilir pariwisata (misalnya, hotel/losmen/penginapan, cinderamata, restoran). Para birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang menyadari bahwa mereka tidak sepenuhnya bisa mengintervensi industri hulu dan hilir sektor pariwisata ini. Sebab, industri hulu dan hilir berada di luar tupoksi mereka. Pengembangan kedua sektor ini (industri hulu dan hilir) sudah menjadi bagian dari tupoksi beberapa dinas/badan/kantor lain di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Palembang menyadari betul bahwa tujuan akhir kegiatan pariwisata adalah pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya. Pertumbuhan ekonomi hanya terjadi apabila kegiatan pariwisata yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Palembang berhasil mengundang para wisatawan domestik dan luar negeri untuk menginap beberapa hari di Kota Palembang. Sayangnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memang tidak memiliki data pasti berapa jumlah wisatawan asing dan domestik yang menginap akibat pelaksanaan event-event pariwisata yang mereka laksanakan. Sebab, mereka tidak pernah melaksanakan penelitian secara khusus untuk memetakan kontribusi event-event yang mereka laksanakan terhadap peningkatan tingkat hunian hotel di Kota Palembang.

Fakta bahwa setiap pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam kalender pariwisata di Kota Palembang selalu ramai dengan penonton adalah benar dan tak terbantahkan. Tetapi, sulit untuk membedakan mana penonton yang berstatus sebagai wisatawan dan non-wisatawan. Ketidakmampuan memetakan persoalan ini semakin mempersulit Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk melihat seberapa jauh kontribusi kegiatan yang mereka laksanakan terhadap perkembangan sektor pariwisata di Kota Palembang. Dalam konteks ini, sangat penting bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Palembang untuk merealisasikan salah satu tugas pemerintah kabupaten/kota di sektor pembangunan pariwisata yang diamanahkan peraturan perundang-undangan, yakni: menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota.

Kapasitas kelembagaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang

Jumlah pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang mencapai 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang. Dari total ini, pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil mencapai 79 (tujuh puluh sembilan) orang dan pegawai honor berstatus kontrak berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang. Di lihat dari usianya, mayoritas pegawai negeri sipil di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang didominasi kelompok umur 31-40 tahun dan 41-50 tahun.

Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang, jumlah pegawai negeri sipil laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Di lihat dari tingkat pendidikan mereka, para pegawai ini mayoritas berpendidikan SLTA, S1, dan S2. Sedangkan golongan pangkat mereka mayoritas berada di golongan II dan golongan III. Komposisi ini menunjukkan bahwa organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditopang oleh sumberdaya manusia berusia produktif dan berpendidikan sarjana.

Sementara itu, jika dilihat dari struktur organisasi mereka, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin 1 (satu) kepala dinas, dibantu 1 (satu) orang sekretaris dengan 3 (tiga) orang kasubag, 4 (empat) kepala bidang yang masing-masing dibantu kepala seksi (kasi), dan dibantu 2 (dua) unit pelaksana teknis dinas (UPTD). Pembagian ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.

Struktur organisasi ini bersifat dinamis. Karena landasan hukum struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditetapkan oleh peraturan daerah, maka setiap saat ini pihak eksekutif dan legislatif bisa merevisi peraturan daerah tentang struktur organisasi ini. Selain itu, rekrutmen pengisian pejabat struktural di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang sangat tergantung kepada *political will* eksekutif. Pasca pelantikan pasangan Romi Hertton – Harnojoyo selaku Walikota Palembang dan Wakil Walikota Palembang, terjadi pergantian pejabat struktural di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. Rotasi jabatan ini, seperti dituturkan salah seorang narasumber, sangat jauh dari pertimbangan kompetensi dalam bidang kepariwisataan. Sebaliknya, rotasi ini sangat bernuansa “politis”. Karena alasan ini maka ada 3 (tiga) jabatan struktural di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang dibiarkan kosong hingga penelitian ini selesai dilaksanakan yakni Kasubag Umum, Kasi Permuseuman dan Kepurbakalaan, dan Kasi Pelayanan Wisata.

Sarana dan prasarana di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang relatif lengkap. Mereka memiliki mobil dinas, motor dinas, ruang kerja, dan peralatan kantor modern. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang juga sudah memiliki situs website sendiri yang beralamat di <http://www.disbudpar.palembang.go.id>. Idealnya, keberadaan sarana dan prasarana ini mampu mendukung kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya update informasi di halaman website Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang juga sudah mengembangkan beragam media promosi pariwisata Kota Palembang. Mereka, misalnya, memproduksi film pendek yang direkam dalam *compact disc* dan *booklet* yang menceritakan destinasi wisata di Kota Palembang. Tetapi, menjadi pertanyaan besar seberapa jauh efektivitas media promosi ini dalam meningkatkan geliat sektor pariwisata di Kota Palembang.

Sementara itu, *standard operating procedur (SOP)* yang digunakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang mengacu ke prosedur umum yang berlaku di organisasi pemerintah pada umumnya, terutama aspek kepegawaian, keuangan, perencanaan, dan pengelolaan program. Hanya dalam hal perijinan sektor pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang sudah menyerahkan pengelolaan urusan ini ke Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Pemerintah Kota Palembang. Perijinan di sektor pariwisata ini meliputi: (a) usaha daya tarik wisata; (b) usaha kawasan pariwisata; (c) usaha jasa pramusiwata; (d) usaha jasa informasi pariwisata; (e) usaha penyediaan akomodasi; (f) usaha jasa perjalanan wisata; (g) usaha penyelenggaraan pertemuan; (h) perjalanan, konferensi, dan pameran; (i) usaha jasa makanan dan minuman; (j) usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; (k) usaha jasa konsultasi pariwisata; (l) usaha wisata tirta; (m) usaha SPA; dan (n) usaha jasa transportasi wisata.

Dari sisi pembiayaan, alokasi dana APBD Kota Palembang untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan termasuk minim. Selama periode 2007-2012, nilai nominal anggaran APBD Kota Palembang yang dialokasikan ke sektor pariwisata cenderung menurun. Jika dibandingkan dengan sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, pekerjaan umum, dan perindustrian, alokasi dana APBD Kota Palembang untuk sektor pariwisata sangat minim. Marginalisasi sektor pariwisata dalam konteks penganggaran tidak hanya terjadi di Kota Palembang, tetapi dialami oleh seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Selama periode 2007 – 2011, APBD Kota Palembang banyak tersedot untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

Minimnya anggaran menyebabkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sulit untuk berkreaitivitas. Besaran alokasi dana APBD Kota Palembang untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipengaruhi dua

hal: *pertama*, *political will* eksekutif sebagai *top management* Pemerintah Kota Palembang. *Kedua*, *political will* legislatif yang turut serta membahas usulan anggaran program dari eksekutif. *Ketiga*, kemampuan para birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk menyusun program-program inovatif yang mampu menarik minat eksekutif dan legislatif untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kota Palembang. Yang terakhir ini sangat penting perannya dalam mendongkrak anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berasal dari APBD Kota Palembang. Sebab, beberapa birokrat yang berhasil diwawancarai menunjukkan peran strategis eksekutif (walikota dan wakil walikota) dan legislatif dalam menentukan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. Kemampuan untuk meyakinkan pihak eksekutif dan legislatif melalui program-program inovatif ini yang belum dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.

Kompetensi birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang

Peneliti menggunakan definisi pariwisata sebagai *starting point* untuk melihat cara pandang birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Palembang dalam memahami sektor pariwisata. Definisi pariwisata yang mereka ungkapkan akan sangat mempengaruhi pemahaman mereka selanjutnya tentang pariwisata. Key informan memiliki definisi yang berbeda tatkala ditanya tentang definisi pariwisata. Meski redaksi kalimatnya berbeda, tetapi seluruh definisi pariwisata yang dikemukakan *key informan* cenderung hanya mengandung komponen perjalanan (*travelling*) dan tempat lain (*outside their usual environment*). Ketiganya melupakan menginap (*staying*) sebagai salah satu komponen terpenting definisi pariwisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang tentang pariwisata tidak utuh. Definisi pariwisata yang meniadakan unsur menginap (*staying*) akan menyebabkan pariwisata kehilangan ruhnya. Wisatawan lokal dan asing yang menginap (*staying*) di tempat yang bukan tempat tinggal mereka adalah tujuan akhir setiap kegiatan pariwisata yang diinisiasi oleh pemerintah dan masyarakat. Ketika para turis lokal dan asing itu menginap maka roda perekonomian lokal bergerak karena transaksi jual beli yang dilakukan para turis dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.

Cara pandang birokrat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang terhadap pariwisata yang meniadakan unsur menginap (*staying*) juga tersurat dalam kalender tahunan kegiatan pariwisata yang mereka buat. Format matriks kalender tahunan kegiatan pariwisata itu hanya mengandung unsur pergerakan/perjalanan orang, barang, dan jasa dari satu tempat ke tempat lain. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang melupakan satu kolom lagi yang bisa diberi judul dengan kalimat: *target turis yang menginap*. Jika kolom ini ditambahkan dalam matriks kalender tahunan kegiatan pariwisata tersebut, maka kontribusi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan indikator standar keberhasilan sektor pariwisata yang seringkali diukur dari tingkat hunian kamar hotel menjadi jelas dan terang-benderang. Dengan kata lain, jika *event* pariwisata tersebut dibiayai APBD, maka investasi ini tidak sia-sia karena berhasil memicu pergerakan ekonomi akibat transaksi yang dilakukan para turis selama menginap untuk menyaksikan beragam *event* yang digelar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.

Narasi di atas menunjukkan bahwa pengetahuan kepariwisataan para birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang belum terlalu mendalam. Sebagian besar birokrat yang diwawancarai membenarkan hal ini. Pemicunya adalah latar belakang pendidikan formal para birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang tidak ada yang berasal dari disiplin ilmu kepariwisataan (*tourism*). Persoalan ini sebetulnya bisa diatasi dengan proses *self-learning*. Sebab, semua disiplin ilmu bisa digunakan untuk memahami pariwisata karena hakikat ilmu pariwisata yang *multi-disipliner*. Apalagi pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyediakan beragam pendidikan dan pelatihan bagi para birokrat untuk meningkatkan kompetensi personal mereka. Persoalannya, tidak seluruh birokrat termotivasi mengikuti beragam pendidikan dan pelatihan ini

dengan serius. Alhasil, keikutsertaan para birokrat dalam pendidikan dan pelatihan ini belum berdampak nyata bagi inovasi-inovasi program di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.

Selain latar belakang pendidikan formal, kompetensi birokrat ini juga dipengaruhi *track record* kepegawaian mereka selama di birokrasi. Mayoritas *key informan* mengakui bahwa pegawai negeri sipil yang bertugas di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang saat ini sangat sedikit yang memiliki pengalaman mengelola urusan pariwisata. Situasi ini tercipta akibat sistem karirisasi di Pemerintah Kota Palembang yang belum serius memperhitungkan latar belakang pendidikan formal, pengalaman kerja, dan rekam jejak diklat dalam rotasi pegawai.

Meskipun pemahaman *key informan* terhadap pariwisata belum terlalu mendalam, tetapi mereka cenderung sepakat bahwa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendongkrak pembangunan sektor pariwisata di Kota Palembang. Kalender tahunan kegiatan pariwisata yang dibuat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang mengindikasikan cara berpikir ini. Beberapa event dalam kalender tahunan kegiatan pariwisata ini diinisiasi dan diorganisir sepenuhnya oleh sekelompok masyarakat. Selain itu, upaya pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) yang melibatkan multipihak yang berkepentingan dengan sektor pariwisata merupakan langkah strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang mendorong partisipasi masyarakat luas di sektor ini.

Beberapa *key informan* yang berasal dari pelaku bisnis di sektor hulu dan hilir industri pariwisata di Kota Palembang juga berkesimpulan bahwa para birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu penyegaran wawasan tentang industri pariwisata. Cara berpikir birokrat yang prosedural dan administratif tidak akan pernah cocok untuk memahami sektor pariwisata yang sangat dinamis karena mengandalkan kreativitas tanpa batas. Meski mereka merasa diuntungkan oleh beragam event pariwisata yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang, tetapi keuntungan ini relatif kecil jika dibandingkan dengan event-event internasional dan nasional yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang. Sebagai contoh misalnya kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON), Southeast Asian Games (SEA GAMES), dan Islamic Solidarity Games (ISG).

Beberapa pengusaha yang berhasil diwawancarai secara tegas mengakui bahwa geliat sektor pariwisata di Kota Palembang lebih banyak disebabkan karena *political will* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berani menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON), *Southeast Asian Games* (SEA GAMES), dan *Islamic Solidarity Games* (ISG). Event kompetisi olahraga berskala nasional dan internasional ini memicu pembangunan infrastruktur fisik yang mendukung perkembangan industri pariwisata. Beberapa media mencatat tingkat hunian hotel *full booked* ketika event-event ini dilaksanakan. Ketika tingkat hunian hotel menurun, maka seperti diungkapkan Iwan Setiawan selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Selatan, para pengusaha mendorong agar pemerintah segera mengagendakan kembali beragam event nasional dan internasional sehingga pengunjung tetap berdatangan ke Kota Palembang (*lihat, <http://palembang.tribunnews.com/06/12/2008/tingkat-hunian-hotel-di-palembang-turun>; <http://trijayafmplg.wordpress.com/page/72/>*).

Menurut data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang, saat ini Kota Palembang memiliki 63 (enam puluh tiga) hotel dengan beragam kelas dan 84 (delapan puluh empat) rumah makan/restoran. Dengan naluri bisnis mereka, para pengusaha ini tetap berupaya agar produk mereka tetap laris manis. Tetapi, para pengusaha ini tetap memiliki keterbatasan untuk mendorong wisatawan untuk berkunjung ke Kota Palembang. Salah seorang pelaku industri kreatif di Kota Palembang yang juga pemilik gerai kaos oblong mengatakan bahwa peran strategis terbesar institusi pemerintah adalah pembangunan infrastruktur, *branding* kota, mengorganisir para pelaku industri pariwisata, dan membangun masyarakat berbasis pariwisata.

Hubungan timbal balik antara kualitas kompetensi birokrat dan kapasitas kelembagaan birokrasi yang mengelola kewenangan di bidang pariwisata

Kepingan fakta-fakta empiris di lapangan membenarkan dugaan awal peneliti tentang hubungan timbal balik (kausalitas) antara kualitas kompetensi birokrat dan kapasitas kelembagaan birokrasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. Hubungan kausalitas ini bisa dijelaskan dengan pendekatan rasionalitas yang mengedepankan akal pikiran manusia untuk mencari hubungan sebab-akibat antar fenomena. Untuk menjelaskan fenomena empiris kualitas kompetensi birokrat dan kapasitas kelembagaan birokrasi dapat digunakan format matriks tabulasi silang (cross tabulation) yang biasa digunakan dalam pendekatan kuantitatif (*lihat*, Tabel 5).

Bertolak dari Tabel 5, peneliti menyimpulkan bahwa (a) kompetensi birokrat dan kapasitas kelembagaan merupakan dua hal yang berbeda meski keduanya merupakan atribut yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang; (b) hubungan kausalitas antara kompetensi birokrat dan kapasitas kelembagaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersifat empiris; (c) kompetensi birokrat bisa menjadi sebab bagi kapasitas kelembagaan dan sebaliknya. Temuan ini menunjukkan pentingnya mengintervensi kompetensi birokrat dan kapasitas kelembagaan birokrasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mengemban amanah konstitusi untuk melaksanakan pembangunan di sektor pariwisata dan kebudayaan.

Tabel 5 Matriks hubungan timbal balik antara kualitas kompetensi birokrat dan kapasitas kelembagaan birokrasi yang mengelola kewenangan di bidang pariwisata

		Kompetensi birokrat			
		Pemahaman birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang tentang defenisi pariwisata tidak utuh	Pengetahuan kepariwisataan para birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang belum terlalu mendalam	Proporsi pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang yang memiliki <i>track record</i> mengelola urusan pariwisata masih minim	Sistem karirisasi di Pemerintah Kota Palembang yang belum serius memperhitungkan latar belakang pendidikan formal, pengalaman kerja, dan rekam jejak diklat dalam rotasi pegawai
Kapasitas kelembagaan birokrasi					
1. Sumberdaya manusia berusia muda tetapi memiliki latar pendidikan yang beragam;	Minimnya sumberdaya manusia yang berlatar pendidikan S1 kepariwisataan menyebabkan pemahaman birokrat menjadi tidak utuh	Minimnya sumberdaya manusia yang berlatar pendidikan S1 kepariwisataan menyebabkan pengetahuan kepariwisataan birokrat belum terlalu mendalam	Tidak ada hubungan timbal balik	Tidak ada hubungan timbal balik	
2. Pendanaan dari APBD Kota Palembang masih minim;	Pemahaman birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang tentang defenisi pariwisata yang tidak utuh menyebabkan rendahnya kemampuan mereka meyakinkan pihak eksekutif dan legislatif perihal pariwisata sebagai	Pengetahuan kepariwisataan para birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang yang belum terlalu mendalam menyebabkan rendahnya kemampuan mereka meyakinkan pihak eksekutif dan legislatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang kesulitan untuk menyusun program-program inovatif yang menarik minat eksekutif dan legislatif untuk didanai dengan APBD Kota Palembang	Tidak ada hubungan timbal balik	

	pemicu perekonomian;	perihal pariwisata sebagai pemicu perekonomian;		
3. Sistem dan prosedur organisasi sudah mapan	Tidak ada hubungan timbal balik	Tidak ada hubungan timbal balik	Tidak ada hubungan timbal balik	Karena sistem dan prosedur organisasi sudah mapan maka sistem karirisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dianggap hal yang wajar
4. Belum ada rencana induk pengembangan sektor pariwisata	Pemahaman birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang tentang defenisi pariwisata tidak utuh sehingga sulit menyusun rencana induk pengembangan (RIP) sektor pariwisata	Pengetahuan kepariwisataan para birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang yang belum terlalu mendalam menyebabkan mereka sulit menyusun (RIP) sektor pariwisata	Proporsi pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang yang memiliki <i>track record</i> mengelola urusan pariwisata masih minim dan menyebabkan mereka sulit untuk menyusun rencana induk pengembangan (RIP) sektor pariwisata	Sistem rotasi pegawai yang tidak memperhitungkan kebutuhan organisasi menyebabkan organisasi kesulitan untuk menyusun rencana induk pengembangan (RIP) pariwisata
5. Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) belum representatif	Pemahaman birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang tentang defenisi pariwisata yang tidak utuh menyebabkan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) kurang diperhatikan	Pengetahuan kepariwisataan birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang yang belum mendalam menyebabkan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) kurang diperhatikan	Proporsi pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang yang bersentuhan dengan pariwisata masih minim menyebabkan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) kurang diperhatikan	Semakin banyak para pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang tidak berlatar ilmu pariwisata, maka semakin mereka tidak peduli dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)

Kontribusi kualitas kompetensi birokrat dan kapasitas kelembagaan birokrasi publik terhadap pola kebijakan dan program pariwisata

Untuk menjelaskan kontribusi kompetensi birokrat dan kapasitas kelembagaan birokrasi publik terhadap pola kebijakan dan program pariwisata, peneliti juga menggunakan pendekatan rasional dan memanfaatkan format tabel tabulasi silang (cross tabulation) yang biasa digunakan pendekatan kuantitatif. Tabel 6 memiliki satu kolom (variabel pola kebijakan dan program pariwisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang) dua baris (yang berisi dua variabel, yakni variabel kompetensi birokrat dan kapasitas kelembagaan).

Secara umum, Tabel 6 menunjukkan bahwa pola kebijakan dan program yang diformulasikan dan diimplementasikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang saat ini dipengaruhi oleh variabel kompetensi birokrat dan variabel kapasitas kelembagaan birokrasi. Jika dianalisis per kolom, misalnya kolom destinasi wisata, maka terlihat sekali bahwa destinasi yang dipilih Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang belum mengakomodir opini para pelancong yang mengikutsertakan Gelora Sriwijaya sebagai destinasi wajib jika melakukan perjalanan ke Kota Palembang. Bisa jadi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan lupa meng-*update* informasi tentang destinasi wisata di Kota Palembang. Tetapi, yang lebih penting lagi, fakta ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang belum secara maksimal mengeksplorasi titik-titik baru destinasi wisata baru di Kota Palembang.

Contoh lainnya adalah kolom menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata. Mengedukasi warga masyarakat agar sadar wisata merupakan amanah UU No. 10 Tahun 2009 tentang

Pariwisata. Salah seorang pelaku industri kreatif mengatakan bahwa kultur warga Kota Palembang yang sadar wisata belum terbentuk sama sekali. Ia menunjukkan Bali dan Jogjakarta sebagai *benchmarking* masyarakat yang sudah sadar wisata. Jika dibandingkan penduduk di Bali dan Jogjakarta, maka warga Kota Palembang masih terintegrasi ke dalam industri pariwisata. Fakta bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum berbuat maksimal untuk mengedukasi warga Kota Palembang secara sistematis agar menciptakan lingkungan yang kondusif bagi wisatawan domestik dan asing merupakan manifestasi sikap galau dalam merespon amanah undang-undang ini.

Tabel 6 menunjukkan bahwa pola kebijakan dan program pariwisata hari ini merupakan buah (effect) situasi yang terjadi pada variabel kompetensi birokrat dan kapasitas kelembagaan di tubuh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. Pada titik ini, yang perlu diintervensi bukanlah buah, tetapi akar dan batang persoalan yang menyebabkan buah itu tumbuh kian membesar. Peneliti meyakini bahwa pola kebijakan dan program akan berubah positif jika kedua variabel ini juga berubah positif.

Tabel 6 Matriks kualitas kompetensi birokrat dan kapasitas kelembagaan birokrasi publik terhadap pola kebijakan dan program pariwisata

	Pola kebijakan dan program				
	Menetapkan destinasi pariwisata Kota Palembang;	Menetapkan daya tarik wisata Kota Palembang;	Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;	Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;	Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
Kompetensi birokrat					
1. Pemahaman birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang tentang definisi pariwisata tidak utuh	Destinasi wisata didominasi wisata sejarah dan alam. Wisata berbasis event (<i>event based tourism</i>) mulai menggeliat meski belum berorientasi <i>go internasional</i> . Secara akumulatif, situasi ini tercipta akibat 5 (lima) preposisi yang menggambarkan kompetensi birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. Sebagai perbandingan, pembaca DetikTravel memilih 5 (lima) destinasi utama wisata di Kota Palembang, yakni: Sungai Musi, Pulau Kemaro, Benteng Kuto Besak, Jembatan	Pemerintah Kota Palembang menetapkan kotanya sebagai Kota Wisata Sungai. Tetapi, dari 13 kegiatan yang termasuk dalam kalender tahunan kegiatan pariwisata hanya 4 yang dilaksanakan di Sungai Musi. Para birokrat belum mengeksplorasi lebih jauh potensi Kota Palembang yang memenuhi rumus daya tarik pariwisata, yakni <i>services, sunset, sunrise, soul, shopping, sport, dan sea</i> . Secara akumulatif, situasi ini tercipta akibat 5 (lima) preposisi yang menggambarkan kompetensi birokrat di Dinas Pariwisata dan	5 (lima) preposisi kompetensi birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang menyebabkan Pemerintah Kota Palembang mengalihkan pengelolaan perijinan usaha pariwisata ke KPPT (Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu) Pemerintah Kota Palembang. Kompetensi ini juga yang menyebabkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang belum memiliki database para pelaku industri pariwisata (hulu dan hilir; kecil, menengah, dan besar; industri kreatif dan non-kreatif) di Kota	Promosi sudah dilakukan melalui beragam kegiatan lokal, regional, dan nasional. <i>Palembang Tourism Board</i> (PTB)/Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) juga sudah merumuskan slogan <i>go Palembang</i> untuk mempromosikan pariwisata Kota Palembang di luar negeri. Tetapi, kegiatan promosi ini belum jelas ditargetkan ke siapa.	Sampai saat ini, tidak ada formulasi program yang dirumuskan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang dalam mengembangkan warga Kota Palembang ke arah masyarakat yang sadar wisata.
2. Pengetahuan kepariwisataan para birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang belum terlalu mendalam					
3. Proporsi pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang yang memiliki <i>track record</i> mengelola urusan pariwisata masih minim					
4. Sistem karirisasi di Pemerintah Kota Palembang yang					

belum serius memperhitungkan latar belakang pendidikan formal, pengalaman kerja, dan rekam jejak diklat dalam rotasi pegawai	Ampera, dan Gelora Sriwijaya. Yang terakhir ini belum diakomodir Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang sebagai destinasi wisata.	Kebudayaan Kota Palembang.	Palembang		
5. Cara berpikir birokrat yang prosedural dan administratif					
Kapasitas kelembagaan birokrasi					
1. Sumberdaya manusia berusia muda tetapi memiliki latar pendidikan yang beragam;	Birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum mampu mengeksplorasi destinasi wisata alternatif yang diminati wisatawan asing dan domestik;	Daya tarik wisata masih dipahami sebatas wisata sejarah, wisata alam, wisata kuliner. Shopping dan sport tourism belum dilihat sebagai daya tarik wisata;	Tidak ada hubungan timbal balik	Kemampuan untuk merumuskan kegiatan promosi pariwisata yang tepat sasaran belum optimal	Belum ada formulasi strategi yang tepat untuk mengedukasi masyarakat agar sadar wisata
2. Pendanaan dari APBD Kota Palembang masih minim;	Minimnya dana APBD menyebabkan birokrat tidak mampu memetakan destinasi-destinasi wisata baru yang diminati para wisatawan lokal dan domestik	Minimnya APBD menyebabkan pemasaran <i>branding</i> Kota Palembang sebagai <i>river tourism city</i> yang identik dengan <i>Venesia from the East</i> sulit berekspansi	Tidak ada hubungan timbal balik	Minimnya dana APBD menyebabkan kegiatan fasilitasi promosi wisata cenderung terbatas pada pola-pola konvensional	Minimnya dana APBD menyebabkan pendidikan warga agar sadar wisata selalu dianak-tirikan
3. Sistem dan prosedur organisasi sudah mapan	Sistem dan prosedur tidak adaptif terhadap aspirasi wisata baru para penduduk	Sistem dan prosedur tidak adaptif terhadap pengembangan daya tarik wisata baru para penduduk	Tidak ada hubungan timbal balik	Promosi pariwisata yang seharusnya mengedepankan kreativitas tenggelam dalam suaranya birokratis	
4. Belum ada rencana induk pengembangan sektor pariwisata	Ketiadaan RIP menyebabkan Dinas Pariwisata dan	Ketiadaan RIP menyebabkan Dinas Pariwisata dan	Tidak ada hubungan timbal balik	Ketiadaan RIP menyebabkan Dinas Pariwisata dan	Ketiadaan RIP menyebabkan Dinas Pariwisata dan

	Kebudayaan tidak fokus mengembangkan sektor pariwisata	Kebudayaan tidak fokus mengembangkan sektor pariwisata		Kebudayaan tidak fokus mengembangkan sektor pariwisata	Kebudayaan tidak fokus mengembangkan sektor pariwisata
5. Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) belum representatif	Destinasi pariwisata hanya dipahami dari sudut pandang pengusaha hotel, restoran, dan biro perjalanan. Industri kreatif belum terakomodir dalam BPPD.	Destinasi pariwisata hanya dipahami dari sudut pandang pengusaha hotel, restoran, dan biro perjalanan. Industri kreatif belum terakomodir dalam BPPD.	Tidak ada hubungan timbal balik	BPPD belum merumuskan langkah-langkah strategis dalam rangka mempromosikan destinasi dan pariwisata di Kota Palembang	Beberapa pelaku bisnis di industri pariwisata masih asing dengan BPPD dan belum melihat tindakan nyata mereka untuk mendidik warga Kota Palembang agar sadar wisata

KESIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan penting yang dihasilkan penelitian ini, yakni: (a) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang sudah menjalankan sebagian amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sebagian amanah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata belum dilaksanakan secara maksimal; (b) Kapasitas kelembagaan birokrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang dapat dirumuskan sebagai berikut: sumberdaya manusia berusia muda tetapi memiliki latar pendidikan yang beragam, pendanaan dari APBD Kota Palembang masih minim, sistem dan prosedur organisasi sudah mapan, belum ada rencana induk pengembangan sektor pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) belum representatif; (c) kompetensi birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang dapat disimpulkan ke dalam lima preposisi sebagai berikut, yakni: pemahaman birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang tentang definisi pariwisata tidak utuh, pengetahuan kepariwisataan para birokrat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang belum terlalu mendalam, proporsi pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang yang memiliki *track record* mengelola urusan pariwisata masih minim, sistem karirisasi di Pemerintah Kota Palembang yang belum serius memperhitungkan latar belakang pendidikan formal, pengalaman kerja, dan rekam jejak diklat dalam rotasi pegawai, dan cara berpikir birokrat yang prosedural dan administratif; (d) melalui pendekatan rasional, penelitian ini menunjukkan secara empiris hubungan kausal antara kompetensi birokrat dengan kapasitas kelembagaan, serta kontribusi kompetensi birokrat dan kapasitas kelembagaan birokrasi secara bersamaan terhadap pola kebijakan dan program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.

Berdasarkan temuan di atas, peneliti menyarankan agar dilakukan terkait dengan topik dan variabel penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga secara statistik bisa dipastikan berapa signifikansi dan seperti apa pola hubungan di antara variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Bagi Pemerintah Kota Palembang, disarankan untuk fokus membenahi kompetensi birokrat dan kapasitas kelembagaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang sebagai titik awal transformasi sektor pariwisata. Bagi pihak-pihak yang peduli dengan pariwisata, wawasan baru tentang sektor pariwisata yang dihasilkan penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan kontribusi positif dalam pembangunan pariwisata di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, 2012. Palembang Dalam Angka 2011. Palembang, Biro Pusat Statistik Kota Palembang.
- Biro Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan, 2007. *Sumsel Dalam Angka 2006*. Palembang, Biro Pusat Statistik Sumatera Selatan.
- Biro Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan, 2010. *Sumsel Dalam Angka 2009*. Palembang, Biro Pusat Statistik Sumatera Selatan.
- Christensen, Tom., 2007. *Organization Theory and the Public Sector: Instrument, Culture, and Myth*. London, Routledge.
- Denhardt, Janet V., & Denhardt, Robert B., 2007. *The New Public Service: Serving, Not Streering*. New York, M.E. Sharpe, Inc.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang, 2012. *Welcome to Palembang: river tourism city*. Palembang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.
- Dubois, David D., et.al., 2004. *Competency-based Human Resource Management*. California, Davies-Black Publishing.
- Edgell, Sr., et.al., David., 2008. *Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today and Tomorrow*. Oxford, Elsevier, Inc.
- [Elliott](#), James., 1997. *Tourism: Politics and Public Sector Management*. London, Routledge.
- [Goeldner](#), Charles R., & Ritchie, J. R. Brent., 2006. *Tourism: Principles, Practices, Philosophies*. New Jersey, John Wiley and Sons, Inc.
- Lane, Jan-Erik., 2000. *New Public Management*. London, Routledge.
- Peters, B. Guy., 2001. *The Politics of Bureaucracy*. London, Routledge.
- Rainey, Hal G., 2009. *Understanding and Managing Public Organizations*. California, John Wiley and Sons, Inc.
- Tompkins, Jonathan R., 2005. *Organization Theory and Public Management*. California, Wadsworth.

Internet

- Departemen Keuangan Republik Indonesia (<http://www.djpk.depkeu.go.id>)
- Detik (<http://travel.detik.com>)
- Kompas online (<http://travel.kompas.com>)
- Tribun online (<http://palembang.tribunnews.com>)
- Website Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang (<http://disbudpar.palembang.go.id>)